

Telaah Kritis terhadap Fungsionalitas Gereja Toraja Berdasarkan Kritik Sosio-Religi Karl Marx

Critical Analysis the Functionality of the Toraja Church Based on Karl Marx's Socio-Religious Criticism

Yakob Sampe Rante

Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana-Indonesia

Diterima: 26 Januari 2021; Direview: 26 Januari 2021; Disetujui: 02 April 2021

*Corresponding Email: Yakobtoraja99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi dan mengevaluasi fungsionalitas gereja, yakni gereja pada fungsi sosialnya. Gereja Toraja masih belum hadir untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara nyata. Akibatnya, berbagai macam ketidakadilan sosial yang diproduksi dari budaya, bermukim tepat dalam lingkup gereja. Gereja hadir sekadar sebagai produsen imajinasi: mengarahkan imajinasi, tanpa memperbaiki permasalahan di bumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi kepastakaan. Sebagai pendasaran, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kritik sosio-religi dari Karl Marx. Inti dari kritik tersebut bukan penolakan terhadap agama, melainkan penolakan terhadap praktik keagamaan yang sekadar menghasilkan ilusi-ilusi semata, sehingga tidak menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat khususnya umat Kristiania, kibatnya, masyarakat menjadi teralienasi. Gereja Toraja dituntut untuk tidak menyelesaikan masalah melalui solusi-solusi dalam bayangan semata, namun sebaliknya membawa solusi yang membebaskan secara konkret dalam masyarakat. Gereja seharusnya menjadi obat yang dirasakan secara nyata dimana terdapat jiwa yang sakit akibat hiruk-pikuknya dunia. Dengan bangkitnya kembali fungsionalitas gereja, maka gereja menjadi benteng yang kuat bagi masyarakat menuju damai sejahtera.

Kata Kunci: Fungsionalitas Gereja; Keadilan Sosial; Alienasi

Abstract

This study aims to critique and evaluate the church's functionality, namely the church in its social function. The Toraja Church is still not here to carry out its real social function. As a result, various kinds of social injustice that are produced from culture settle right within the sphere of the church. The church exists only as a producer of the imagination: directing the imagination, without fixing problems on earth. This study uses a qualitative method with a literature observation approach. As a basis, the theory used in this research is Karl Marx's socio-religious criticism theory. The essence of this criticism is not rejection of religion, but rejection of religious practices which merely produce illusions, so as not to solve the problems experienced by society, especially Christians, as a result, society becomes alienated. The Toraja Church is required not to solve problems through imagined solutions, but instead to bring concrete liberating solutions in society. The church should be a real medicine where there is a sick soul due to the chaos of the world. With the revival of church functionality, the church has become a strong fortress for the community towards peace.

Keywords: Church Functionality; Social Justice; Alienation

How to Cite: Rante, Y.S. (2021). Telaah Kritis terhadap Fungsionalitas Gereja Toraja Berdasarkan Kritik Sosio-Religi Karl Marl, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(1): 1-9.



PENDAHULUAN

Jargon “menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia” sering kali muncul dalam setiap aktifitas gerejawi. Tidak jarang jargon tersebut disebut-sebut sebagai panggilan gerejawi bagi umat kristiani untuk menjadi berkat dalam kehidupannya. Realitasnya, jargon tersebut hanyalah “bahasa kosong” yang terus dikumandangkan oleh gereja sendiri. Terkadang gereja sendirilah yang menciptakan ketimpangan sosial, konflik dalam masyarakat, dan ketidakberpihakkan terhadap kaum marginal.

Eka Darmaputera menuliskan bahwa, kita sering kali menerima kenyataan paradoksal yang sedang berlangsung sekarang yaitu “kebangkitan agama” diiringi oleh “kemerosotan etika” (Darmaputera, 2000). Terlihat bahwa realitas perkembangan agama didasari oleh sikap individualitas yang semakin mewarnai sistem lapisan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, individualitas menjadi superior di atas orang lain, sehingga berdampak pada dominasi atas orang lain. Sering kali politik kepentingan menjadi dasar dari dominasi itu. Hal semacam inilah yang mendorong lahirnya struktur kekuasaan, sehingga menghasilkan masyarakat yang eksploitatif.

Dalam tulisan Ricardo F. Nanuru, memang telah diuraikan jalan keadilan khususnya Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) dalam menghadapi rasio kemiskinan di Halmahera yang tinggi. Tidak lagi dengan konsep “diakonia” yang membuat umat ketergantungan, tetapi masih begitu sulit karena melibatkan umat untuk bertarung dengan pemilik modal yang besar di dunia bisnis di dalam sistem kapitalisme. Ada dua hal yang ditawarkan oleh Ricardo. Pertama, memberdayakan jemaat-jemaatnya lewat kegiatan-kegiatan di dunia bisnis. Kedua, GMIH sudah saatnya lebih intensif keluar dari ruang privat religiusnya, bergabung bersama entitas privat lainnya, untuk menciptakan diskursus rasional komunikatif (Nanuru, 2017). Ditengah-tengah ketidakadilan, suara-suara kenabian yang harusnya dikumandangkan oleh gereja justru tidak terdengar. Seperti masalah agraria di Indonesia yang banyak memakan korban dari kalangan orang-orang kecil dan menguntungkan para pemilik modal. Gereja sebagai lembaga yang mengidentikkan diri sebagai ‘garam dan terang dunia’ khususnya di Indonesia, seperti menutup telinga dan mata akan masalah tersebut. Bukankah seharusnya gereja bersikap seperti nabi Elia dalam cerita raja Ahab dan Nabot (1 Raj. 21) yang menyerukan pertobatan sebagai hukuman dari Allah kepada raja Ahab atas perbuatannya merampas tanah Nabot (Dase, 2019).

Gereja sebagai lembaga memang mempunyai banyak problem. Fungsionalitasnya sering tidak teralisasi di dalam kehidupan masyarakat. Suara-suara kenabian gereja hanya sebatas empati tanpa adanya makna fungsionalitas. Dalam tulisan ini, penulis akan menyoroti pelayanan yang dilakukan Gereja Toraja dalam kehidupan umat dan masyarakat umum. Gereja Toraja saat ini memiliki tujuh panggilan Gereja, yaitu penggalan, pengakaran, dan penyebarluasan pokok-pokok iman kristen yang kontekstual, pengembangan kapasitas para pelayan dan kapasitas penatalayanan kelembagaan, peningkatan peran dan fungsi gereja dalam transformasi sosial budaya, peningkatan partisipasi gereja dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi masyarakat, peningkatan akuntabilitas gerejawi dalam bidang politik dan hukum, peningkatan kepedulian dan tindakan gereja dalam pemeliharaan keutuhan ciptaan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan gerejawi dan pendampingan warga gereja pengguna TIK.

Dari kesemuanya itu, secara *implisit* Gereja Toraja dimaksudkan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, tetapi pada kenyataannya masih banyak masalah sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat Toraja. Salah satu masalah faktual adalah *goal* dari *Rambu Solo’* yang banyak menimbulkan *prestise* dalam masyarakat. *Prestise* yang dimaksudkan di sini adalah masalah identitas yang dimunculkan dalam pemotongan kurban kerbau, baik dari segi jumlah, strata sosial, bahkan layak dan tidak layaknya seseorang memotong kerbau karena latar belakang sosialnya. Dengan kata lain, jumlah kurban kerbau menjadi patokan sehingga terjadi pergeseran makna karena dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme. Angka kemsikinan di Toraja yang masih sangat tinggi di tengah meriahnya upacara gerejawi, upacara adat dan upacara pemerintah.

Realitasnya, gereja belum mengambil sikap kritis terhadap masalah tersebut. Akibatnya, hutang keluarga yang bertumpuk hanya untuk sebuah *prestise* (Abdurahim, 2015). Terlebih lagi



muncul konflik dalam masyarakat Toraja dengan terbentuknya Lembaga Pekabaran Injil (PI) Gereja Toraja. Lembaga PI tersebut, menugaskan tenaga-tenaga pelayan yang secara khusus ditempatkan di daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat beragama suku (*Aluk Todolo*).

Gereja yang diharapkan dapat memberi inspirasi bagi perubahan sosial ke arah yang bermartabat, justru menjadi penyulut api konflik dan ketidakmerataan nilai-nilai sosial di sebuah negara religius. Tidak dapat dipungkiri bahwa, tidak jarang gereja menjadi sekutu para penghisap dan penindas. Gereja seringkali “bersekutu” dengan mereka yang berkuasa dan memiliki modal, lalu membiarkan “rakyat” hidup dalam keadaan “miskin dan tak berdaya.” Hal tersebut kemudian melahirkan pertanyaan: Apakah dimensi sosial sebagai ladang pelayanan telah diperhatikan dengan maksimal oleh gereja? Untuk menanggapi seluruh persoalan di atas, maka penulis menggunakan konsepsi berdasarkan kritik agama dari Karl Marx sebagai tokoh yang hadir di tengah-tengah kemerosotan moral untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan mengkritik ketidakadilan yang ada. Melalui persoalan di atas dan didukung oleh konsep yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini menjadi semakin jelas, yakni: bagaimana telaah kritis berdasar pada permasalahan yang ada dengan menggunakan kritik sosio-religi Karl Marx dalam memandang fungsionalitas gereja?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, kepustakaan. Pada bagian kepustakaan dilakukan penelusuran data ekunder melalui tulisan dalam buku, artikel, serta media lainnya. Dimulai dengan menggunakan kepustakaan berupa karya-karya Karl Marx (konsepsi dan kritiknya). Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian sekunder dalam buku-buku secara sistematis dan tematis (Bakker&Zubair, 2009). Kemudian data-data yang dikumpulkan diolah secara deskriptif-kualitatif. Bagian ini disebut analisis data. Kemudian penulis akan melakukan sebuah eksplorasi-reflektif-sistematis terhadap kritik agama Karl Marx dengan bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan, sehingga akan memunculkan instrumen-evaluatif-teologis terhadap fungsionalitas gereja pada konteks sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karl Marx: Kritik Sosio-Religi

Karl Marx merupakan filsuf asal Jerman yang terkenal dengan teori-teori sosialnya yang dikembangkan sampai saat ini. Beberapa teorinya bahkan merambah ke berbagai dimensi kehidupan: ekonomi, politik, maupun agama. Marx mengupayakan agar apa yang menjadi konsep pemikirannya tidak hanya semata-mata sebatas usaha teoritis, melainkan juga sebagai usaha yang real. Marx selalu menuntut agar filsafat menjadi praksis, artinya agar filsafat menjadi pendorong perubahan sosial (Suseno, 1999). Hal tersebut tertuang dalam rumusan Marx dalam “tesis no. 11 tentang Feuerbach” yang termasyhur: “Para filosof hanya memberikan interpretasi yang berbeda-beda kepada dunia. Yang perlu ialah dengan mengubahnya (Suseno,1999).

Kutipan “*it (religion) is the opium of the people*” (agama adalah candu rakyat) menjadi sebuah pernyataan Marx yang dilontarkan sebagai sebuah bungkusan kritik terhadap agama. Dari hal tersebut segala kesalahpahaman terjadi, sebab kritik tersebut dipandang sebagai “ejekan” terhadap agama. Ketika hal tersebut ditafsir secara harafiah maka sesungguhnya terjadi reduksi terhadap pemikiran Marx karena dapat dipahami sebagai sebuah ejekan terhadap agama. Untuk memahami kalimat tersebut, Marx mengatakan, sebagaimana dalam kutipan Eko P. Darmawan.

Bagaimana arti kalimat-kalimat di atas, sehingga seolah menjadi begitu sulit untuk dipahami? Pertama, patut diingat bahwa agama hadir dalam masa kegelapan suatu masyarakat dalam suatu kehidupan bersama. Agama adalah obat bagi jiwa yang sakit, lampu penerang bagi jalan kehidupan, artinya agama tidak mungkin hadir pada masa ketika jiwa telah sehat, ketika jalan hidup itu telah terang benderang, untuk apa obat ketika tubuh sehat? Untuk apa lampu penerang manakala matahari bersinar terang benderang? Agama merupakan antitesis dari sebuah masa kegelapan (Suseno, 1999). Agama adalah pembimbing menuju terang benderang. Agama tidak hadir secara semena-mena, melainkan kondisi masyarakatlah yang melahirkan hadirnya agama.



Kedua, agama hadir sebagai ajaran yang bersifat eksternal dari diri manusia, entah dalam wujud nabi atau Kitab Suci. Sifat eksternal artinya manusia membutuhkan otoritas di luar dirinya untuk menemukan pencerahan dirinya dan menemukan penerangan atas jalan hidupnya (Suseno, 1999).

Bagi Marx, kritik agama menjadi suatu pintu pembuka untuk masuk pada kritik masyarakat, karena kritik agama adalah juga kritik terhadap masyarakat yang memproduksi agama. Agama tidak lain adalah produk dari masyarakat kelas dan merupakan ekspresi dari kepentingan kelas. Dalam hal ini, agama dijadikan alat untuk memanipulasi dan menindas kelas bawah dalam masyarakat. Dengan penindasan yang terjadi, agama menjadi tempat untuk penghiburan pada kehidupan mendatang atau dengan kata lain, agama membuat manusia menjadi *teralienasi* dari dirinya sendiri. Pada kondisi itu, yang menjadi perhatian utama adalah *alienasi* sebagai sebuah bentuk reduksi nilai-nilai kemanusiaan atau dehumanisasi sebagai akibat dari struktur dan logika kapitalisme.

Dalam kritik agama, Marx tidak berminat kepada Allah yang ada atau tidak, tetapi berminat pada agama sebagai *kekuatan sosial*. Marx melihat bahwa agama sebagai “candu masyarakat” yang membawa ilusi kebahagiaan, namun bukan kebahagiaan sejati. Seperti yang dikatakan oleh George Ritzer dan Douglas J. Goodman: Marx dengan jelas menyatakan bahwa pada hakikatnya dia tidak menolak agama, melainkan menolak segala sistem yang mengandung ilusi-ilusi agama (Ritzer dan Douglas, 2004). Artinya, ilusi agama menjadikan manusia tampak kerdil, sehingga melupakan dunia sosial yang dihidupi sehari-hari. Singkatnya, ilusi agama mengakibatkan manusia kehilangan kepekaan perasaannya, lantas kehilangan keluasan pikirannya.

Kritik agama Marx merupakan kritik terhadap cara-cara empiris manusia menjalankan keberagamaannya lalu melahirkan *alienasi* terhadap sesamanya. Kritik tersebut sungguh tajam, karena keberagamaan sekarang ini lebih mendekatkan diri pada modus bereksistensi borjuis-kapitalis, ketimbang dengan modus bereksistensi yang religius secara sosio-historis. Agama hanya puas menjadi penonton sejarah, karena berdalih bahwa kebahagiaan sejati ada di akhirat. Agama hanya sibuk dengan surganya sendiri. Agama tak lagi sedih manakala terjadi masalah sosial, kerusakan alam, eksploitasi di darat maupun di laut. Ringkasnya, model keberagamaan borjuis-kapitalis bukan keberagamaan yang berpijak pada masalah-masalah yang terjadi di muka bumi ini dan bukan keberagamaan yang aktif dan kreatif (Ritzer dan Douglas, 2004) Marx melihat semuanya itu sebagai sebuah kepercayaan keberagamaan yang sedang mengalienasi dan mendehumanisasi sesamanya. Sebab, keberagamaan seperti itu tidak menjadi praksis.

Kekuasaan Gereja dan Ketidakadilan Sosial

Hal penting yang menjadi objek pembacaan kritik Marx adalah agama. Dalam hal ini, gereja yang *absen* dalam masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah konteks gereja. Abd Moqsith Ghazali mensinyalir bahwa, dalam perkembangan kontemporer, agama telah mengalami berbagai distorsi di tangan para pemeluknya ataupun dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melayani kepentingan-kepentingan mereka sendiri, atau hanya untuk keserakahan segelintir orang untuk mempertahankan *status quo* (Schuman, 2000). Abd Moqsith Ghazali menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat indikator yang bisa ditunjuk: (1) agama telah disalahgunakan oleh penguasa negara, dengan melalui dua jalur: pertama, dipundak para penguasa, agama mengalami proses politisasi “yang mengerikan” agama yang seharusnya menjadi teks yang jujur dimanipulasi demi kepentingan penguasa dan kekuasaan. Agama dijadikan alat untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan penguasa. Kedua, di tangan penguasa negara, agama mengalami proses marginalisasi dan disfungsionalisasi. Dalam konteks Indonesia, rezim Orde Baru secara telanjang berhasil menenggelamkan agama dalam perkara-perkara yang tabu untuk dibicarakan, hanya karena ia diduga memicu dan meledakkan konflik. Pada kondisi itu, agama seolah terkurung dalam kemandulan perdamaian; (2) Sebagaimana para penguasa negara, aparatus agama yang bertakhta dalam sejumlah ormas keagamaan, tidak jarang melakukan praktik-praktik “pemburaman” terhadap agama, sehingga agama terlucuti dari awal kehadirannya. Agama tidak jarang dijadikan sebagai alat tawar-menawar serta komoditi politik dan ekonomi; (3) Para agamawan dan fungsionaris agama, terutama dari sayap fundamentalis-konservatifnya, sering terlibat dalam upaya agama yang garang, keras dan sangar; (4) Agama telah

direduksi sebagai institusi layanan ritual dengan menampung serta menghibur mereka yang tengah berduka akibat tersuruk dari panggung politik dan ekonomi, serta kegagalan hidup (Schuman, 2000).

Kini agama menjelma menjadi seperangkat keluh-kesah warga masyarakat yang tertindas. Namun, agama hanya mampu menawarkan penenangan yang semu, tetapi tidak mampu menghapus faktor penyebab penderitaan itu. Hal ini semakin jelas bahwa agama yang demikian bukanlah agama bagi masa depan. Pada dasarnya, hal seperti itu terjadi entah karena unsur kesengajaan oleh beberapa pihak atau semacam ketidaksengajaan saja, namun tetap menjadi pembicaraan banyak orang karena merugikan banyak pihak. Fenomena-fenomena sosial seperti itu tidak dapat dipungkiri, yang kemudian merambah sampai pada sisi keagamaan secara khusus gereja, sebagai bagian integral dari masyarakat itu sendiri.

Kritik Sosio-Religi Karl Marx terhadap Fungsionalitas Gereja Toraja

Berangkat dari uraian di atas mengenai hakikat gereja serta masalah-masalah-masalah sosial dimana gereja di dalamnya hidup dan bertumbuh sebagai bagian integral dari masyarakat. Maka pembicaraan mengenai kritik sosio-religi Marx, sebagai sebuah instrumen-evaluatif-teologis bagi fungsionalitas gereja dalam menghadapi masalah sosial di Toraja, mendapatkan sentuhan nilai aktualnya untuk mendorong pada perubahan paradigma keadilan sosial yang lebih mutakhir dan akomodatif bagi aktualisasi kemanusiaan yang lebih beradab.

Dengan kembali melirik fungsionalitas gereja berdasarkan hakikatnya, maka melalui beragam munculnya masalah sosial, antara lain: ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan penyakit sosial lainnya. Hal tersebut menjadi tanda bahwa fungsionalitas gereja belum maksimal hadir dalam masyarakat untuk mewujudkan tugas dan panggilannya sebagai bentuk suara profetiknya. Dalam kerangka inilah kritik sosio-religi Marx berupaya untuk mengembalikan nilai *Imago Dei* (melepaskan keterpenjaraan manusia dari segala hiruk pikuk akibat sistem kapitalisme), dengan kembali mengingatkan gereja agar secara tegas membenahi diri dan menegaskan keberpihakannya kepada kebenaran, keadilan, dan mereka yang terpinggirkan.

Gereja Toraja sebagai lembaga yang telah menyatakan diri sebagai garam dan terang banyak menciptakan ketidakseuaian asas garam dan terang itu sendiri. Khususnya lembaga PI, menurut salah satu pelayan khusus Gereja Toraja (Tenaga PI) kehadiran gereja dalam wilayah-wilayah Pekabaran Injil yang masih terdapat agama suku memang dimaksudkan untuk dapat menjadi terang bagi kehidupan masyarakat secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dengan berdasarkan Injil. Bahkan menurutnya, kegiatan PI ini tidak dimaksudkan sebagai suatu pola kristenisasi (RB, Januari 2020). Secara sekilas mungkin tidak ada kejanggalan yang didapatkan dari pernyataan narasumber, tetapi penulis melihat pembentukan lembaga PI dan ditugaskannya para pelayan ke daerah-daerah yang masih memiliki agama suku dapat dibaca sebagai pernyataan simbolik yang ingin menyatakan bahwa di daerah tersebut, masyarakatnya masih diklasifikasikan sebagai kafir, karna belum menjadi Kristen. Lembaga yang harusnya menjadi terang, malah membentuk stigma dalam masyarakat. Menurut data dari lapangan, muncul segregasi dalam relasi masyarakat yang beragama Kristen dan *Aluk Todolo* karena gotong royong yang awalnya harmonis diantara keduanya justru berkurang karena adanya batasan-batasan atau larangan untuk berpartisipasi ketika salah satu pemeluk keyakinan tersebut menjalankan ritus-ritus keagamaannya. Pada awalnya keduanya saling bergotong royong dan saling menghargai ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, namun di saat sekarang relasi demikian sudah kurang harmonis. Hal ini secara tidak langsung membentuk konflik dalam masyarakat yang bersifat alienatif.

Dengan adanya stigma yang berkembang dalam masyarakat oleh karena lembaga PI Gereja Toraja, maka sangat bertentangan dengan apa yang dibahas dalam *World Council of Churches* (WCC) pada tahun 2013, bahwa penghargaan atas seluruh umat manusia adalah salah satu bentuk pemaknaan akan manusia sebagai "citra Allah" (Aritonang, 2017). Artinya, dapat secara sederhana dipahami bahwa apun status, identitas, gender, dan agamanya, mereka harus dihargai. Karena itu, kehadiran Lembaga Pekabaran Injil Gereja Toraja dan mendirikan pos penginjilan di daerah-



daerah umat beragama *Aluk Todolo* merupakan salah satu langkah tidak menghargai keberadaan orang-orang beragama suku. Serta penganut agama suku seolah teralienasi dari hakikat kemanusiaannya yang seharusnya memiliki kebebasan dalam menentukan kepercayaan. Celakanya lagi, stigma itu berkembang menjadi stigma bahwa agama suku tidak lagi diklasifikasikan sebagai agama yang resmi, sehingga dianggap kafir atau primitif.

Pembahasan mengenai ketidakadilan serta penyakit-penyakit sosial yang terjadi di Indonesia, bukanlah tema yang teoritis dan abstrak, melainkan sebuah realitas yang tidak dapat disangkal karena lewat pemberitaan media massa, media elektronik maupun secara langsung kita lihat atau alami. Akselerasi hal tersebut terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, gereja sering sibuk dengan “kristenisasi,” pembangunan rumah ibadah, memeriahkan kebaktian secara selebrasi, pelaksanaan rutinitas gerejawi secara formal, dan sebagainya. Apabila Gereja Toraja masih terjebak pada pola “kristenisasi,” hal ini sama sekali tidak menyentuh kehidupan aktual manusia secara konkret. Akibatnya, gereja akan kehilangan kapabilitas dan kredibilitasnya. Pertanyaan yang kemudian hadir adalah mengapa gereja menghilang dalam masalah sosial? Dimana gereja ketika terjadi masalah-masalah sosial yang begitu konkret?

Jelas bahwa gereja Toraja belum benar-benar hadir memenuhi tugas dan panggilannya dengan menjawab masalah sosial yang muncul secara konkret dalam masyarakat. Gereja belum maksimal dalam melawan dan mengkritik segala macam penindasan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau para penguasa. Gereja tidak menjadi energi pembebas atas keterpenjaraan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap seperti itu yang memberi kesan bahwa gereja pasif terhadap masalah sosial, bahkan nyaris tidak memberikan kontribusi pembebasan bagi masyarakat yang penuh dengan hiruk-pikuk persoalan sosial. Dengan demikian, gereja terjebak dalam eksistensi negatifnya (Agama yang *ambivalen* atau memiliki fungsi ganda yaitu membebaskan dan memenjarakan), yaitu “memenjarakan,” gereja yang tidak peduli dengan kondisi kemanusiaan di sekitarnya. Gereja kadang telah terintegrasikan ke dalam sistem atau logika kapitalisme atau gereja mengalami distorsi di tangan pemeluknya, dimana nilai-nilai kemanusiaan ditaklukkan oleh nilai yang ekonomistik. Hal tersebut yang kemudian memicu munculnya ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, dan penyakit-penyakit sosial lainnya.

Angka rasio kemiskinan kabupaten Toraja Utara masih tinggi. Pada tahun 2018 saja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan masih berada di urutan ketiga atau sebesar 14,41 % (Azwar & Subekan, 2016). Anehnya, di daerah tersebutlah upacara kematian besar-besar dilaksanakan dengan anggaran miliaran rupiah. Adat upacara kematian (*Rambu Solo'*) di Toraja yang di junjung tinggi telah terkontaminasi dengan kapitalisme, khususnya dalam pemotongan kerbau (Pangrante, 2017). Seharusnya gereja mengambil sikap kritis dalam masalah ini, bukan sebaliknya terdistorsi dengan pola adat seperti itu. Adat tersebut mungkin perlu direkonstruksi pemahamannya dalam hal pemotongan kerbau karena cukup berdampak secara sosio-okologis.

Ketika gereja tidak maksimal hadir sebagai pembebas dalam realitas yang membutuhkannya, maka gereja hanya membangun sebuah penyelesaian atau solusi yang tidak real: melulu “membicarakan” Tuhan dan menjanjikan surga, dimana masyarakat terobsesi untuk hanya ingin merasakan surga, tanpa lebih dahulu menciptakan surga di dunia ini untuk dirasakan dengan nyata sebagai bentuk tanggung jawab manusia atas kemanusiaannya. Konsep seperti itu pada dasarnya melumpuhkan semangat kristiani dengan menyerahkan segala masalah kepada Tuhan, sehingga meminimalkan kepekaan terhadap realitas sosial dan hilangnya tanggung jawab dalam penyelesaian masalah secara konkret. Gereja mestinya tidak hanya menyelesaikan masalah dalam doa-doa, melainkan gereja seharusnya menjadi pembebas ke arah praksis. Mencintai atau mendekatkan diri kepada sesama adalah bentuk kasih kepada Tuhan (Tjahjadi&Simon, 2007)

Implikasi praktis dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah juga bentuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Kecintaan terhadap Tuhan merupakan keterlibatan diri dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkret. Sebagaimana dalam semboyan Ludwing Feurbach “*Homo Homini Deus*” (manusia adalah Allah bagi sesamanya) (Petrus & Simon, 2003). Ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan penyakit sosial merupakan masalah konkret. Untuk itu gereja harus menyelesaikan dengan tindakan konkret, bukan dengan cara gaib atau abstrak (hanya dengan berdoa, kebaktian, menuntut Tuhan menyelesaikan, dan seterusnya). Idealnya

adalah jika manusia yang melahirkan masalah tersebut, maka juga menjadi urusan dan tanggung jawab manusia. Manusia bukan hanya “*Homo Sapiens*” tetapi manusia adalah “*Homo Fiber*” dan “*Homo Ludens*”. Bandingkan dengan *Theses On Feurbach* (Tesis Tentang Feurbach) yang ke-XI (Darmawan, 2005).

Gereja yang tidak maksimal dalam pelayanan fungsi sosialnya, secara tidak sadar sedang melakukan proses *alienasi* yaitu menjauhkan manusia dari hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan demi menikmati kerajaan Allah di dunia ini secara nyata. Gereja semestinya progresif untuk mengubah dunia dan berusaha agar Tuhan benar-benar hadir dan dirasakan secara konkret dalam realitas sosial. Jangan melulu kualitas iman diletakkan sebagai yang eksternal, melainkan mesti dilihat sebagai kualitas kemanusiaan dalam korelasinya dengan Tuhan, sesamanya, dan dunia sosial sebagai tempat hidupnya yang konkret. Untuk itu Gereja perlu meninjau kembali konsep eskatologisnya. Karena, jika gereja hanya berpegang pada konsep keselamatan di akhirat, maka dunia ini hanya sekedar tempat manusia mampir minum dan makan atau hanya menjadi tamu dan bukan pemilik atau bagian integral dunia ini. Hal seperti itulah yang mengakitbakan gereja sekarang ini terjebak pada ibadah ritual, sebab berprinsip bahwa jika melakukan peribadahan maka manusia telah menjadi saleh, hidupnya akan menjadi sukses, maka dengan demikian, urusan di dunia selesai. Inilah yang disebut sebagai kemerosotan moral. Dalam sebuah sajak yang ditulis oleh seorang wanita (Stott, 1984)

Saya kelaparan, dan anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan
kelaparan saya,
Saya terpenjara, dan anda menyelinap ke kapel anda untuk berdoa bagi kebebasan saya
Saya telanjang, dan anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilan saya
Saya sakit, dan anda berlutut dan menaikkan syukur kepada Allah atas kesehatan anda
Saya tidak mempunyai tempat berteduh, dan anda berkhotbah kepada saya tentang kasih
Allah sebagai tempat berteduh spiritual
Saya kesepian, dan anda meninggalkan saya sendirian untuk berdoa bagi saya
Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat kepada Allah. Tapi saya tetap amat lapar, kesepian,
dan kedinginan.

Kritik Sosio-Religi Karl Marx: Instrumen-Evaluatif-Teologis terhadap Fungsionalitas Gereja Toraja

Ada pandangan yang mengatakan bahwa kehidupan manusia di dalam beragama merupakan benteng terakhir kemanusiaan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa agama dibutuhkan oleh semua manusia oleh karena memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Akan tetapi dengan melihat permasalahan yang terjadi, agama dalam hal ini gereja terkesan tidak maksimal, bahkan terkesan apatis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Gereja sudah sepatutnya harus memulai untuk lebih peka terhadap urusan sosial sebagai wujud tanggung jawab pelayanannya. Dalam tradisi kekristenan diyakini bahwa Yesus mengkritik model keberagamaan yang hanya sibuk pada tataran ritual saja, sehingga melupakan dimensi sosial. Karya pembebasan harus sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan manusia yang konkret saat ini. Dengan demikian, gereja harus mengambil bagian aktif dalam pembaharuan kehidupan manusia yang disebut Guitierrez “sakramen sejarah” (Hesselgrave dan Rommen, 2009). Sebab iman hanya dapat dibuktikan dalam perjuangan demi pembebasan orang-orang tertindas, karena merupakan bentuk tugas dan panggilan gereja dalam menyuarakan suara profetiknya.

Yesus sendiri mengkritik kepercayaan yang tidak menyatu atau melebur dengan realitas sosial: “bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! Akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di Sorga” (Mat. 7:21). Bila dibaca pada keempat Injil, maka jelas bagaimana Yesus mewujudkan panggilan Mesianis eskatologis-Nya melalui seluruh pelayanan-Nya yang nyata dalam realitas sejarah (pelayanan orang sakit, orang miskin, pembebasan dari keterpurukan, dan sebagainya) sehingga senantiasa menjadi acuan kiprah sosial gereja, sebagai basis dimana gereja melayani. Secara eksplisit, Allah



memerintahkan pemimpin rakyat untuk “melepaskan orang miskin yang minta tolong, orang yang tertindas, orang lemah” (Mzm. 72: 12-14).

Studi Yesus Sejarah memperlihatkan aspek-aspek yang menarik bagaimana Yesus menghadapi secara kritis kenyataan sosial yang buruk pada zaman-Nya, yang merupakan tradisi eksploitasi para penguasa yang dilegitimasi tradisi agama. Yesus menentang sistem kekudusan dengan batas-batas sosial yang mendukung eksploitasi para penguasa. Yesus menentang kolusi pemimpin agama dengan para pedagang yang berpusat di Bait Allah. Sehingga gerakan Yesus dibaca sebagai sebuah ancaman bagi *status quo* para pemimpin agama pada masa itu yang takluk di bawah arus gelombang kapitalisme.

Gereja seharusnya benar-benar menjadi suatu gerakan sosial yang menapak jalan mesianik-eskatologis Yesus, daripada sekadar menjadi lembaga ritual atau lembaga pelayanan ritual-pastoral yang statis. Gereja dipanggil untuk berani menyampaikan suara kenabian yang kritis ditengah realitas sosial, serta dengan tegas menyatakan posisi keberpihakannya terhadap kaum tertindas dan terpinggirkan akibat ketidakadilan struktur. Hal lain yang tak kalah pentingnya bahwa, dengan berangkat dari pilar utama gereja yaitu “kasih” maka semakin jelas bahwa gereja memiliki tugas dan tanggung jawab dalam dunia ini untuk mengasihi sesamanya, sebagai sebuah bentuk penerapan nilai-nilai ketuhanan yang real, dimana ketika manusia mengasihi dan mencintai sesamanya, maka juga telah mencintai dan mengasihi Tuhan. Patutlah bagi gereja untuk menempatkan praksis sebagai peran utama pembebasan kaum tertindas dan terpinggirkan akibat struktur dalam masyarakat yang tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gutierrez mengatakan, kita menemukan Tuhan dalam perjumpaan dengan sesama, khususnya mereka yang miskin, tersisihkan dan terperas (band. Mat. 25:40, 45). Suatu tindakan cinta kepada mereka adalah tindakan cinta terhadap Tuhan.

Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, banyak teks yang mengkritik perbuatan yang tak adil, pihak penindas terhadap kaum lemah (Am. 2:6-7, Luk. 12:13-21, 18:18-26, Yak. 2:5-9). Jadi, ketidakadilan adalah kondisi yang tidak manusiawi atau bersifat *alienasi* kepada seseorang karena mengakibatkan bentuk penderitaan yang konkret: fisik (sakit), ekonomi (lapar), sosial (tersingkir dari masyarakat), politik (tertindas), religius (dianggap berdosa) (Chen, 2003). Dengan kalimat lain, menindas sesama berarti melawan Allah (bdk. Ul. 24:14-15, Kel. 22:21-23, Yer. 22:13-16), siapa yang menindas orang lemah, berarti menghina Pencipta-Nya (Ams. 14:31). Akhirnya, gereja seharusnya kembali menyuarakan suara profetiknya serta menunaikan tugas dan panggilannya di tengah-tengah dunia yang real, demi terciptanya masyarakat yang *shalom* sebagai perwujudan dari “kasih” yang merupakan inti dari pengajaran gereja.

SIMPULAN

Kritik Karl Marx hadir sebagai sebuah reaksi terhadap agama dan keimanan yang dihayati dan dipraktekkan secara dangkal dan distortif. Kritik sosio-religi Karl Marx merupakan seruan pembebasan dari paradigma surga yang egosentrisme dan paradigma ketuhanan yang teosentrisme, yang sifatnya *alienatif* dan dehumanisasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kritik agama Marx menantang gereja untuk lebih maksimal dalam fungsionalitas pada dimensi sosial secara konkret. Memaksimalkan pemaknaan kembali tugas dan panggilan gereja dalam dunia ini, demi mewujudkan keadilan sebagai tanda hadirnya Kerajaan Allah. Melalui kritik sosio-religi Marx, Gereja Toraja diajak untuk memurnikan dan memaksimalkan fungsinya di bidang sosial. Hal ini dipahami agar gereja kemudian tidak terlibat dalam sistem kapitalisme sebagai sumber *alienasi*. Gereja Toraja dituntut untuk tidak menyelesaikan masalah melalui solusi-solusi dalam bayangan semata, namun sebaliknya membawa solusi yang membebaskan secara konkret dalam masyarakat. Gereja seharusnya menjadi obat yang dirasakan secara real dimana terdapat jiwa yang sakit akibat hiruk-pikuknya dunia. Dengan bangkitnya kembali fungsionalitas gereja, maka gereja menjadi benteng yang kuat bagi masyarakat menuju damai sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab, (2009), Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jakarta: LAI.



- Abdurahim, A., (2015), "Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurnal Akuntansi Multi-paradigma, 6 (2): 55-65.
- Azwar dan Subekan, A., (2016), Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 2 (1):1-25.
- Aritonang, J. S., (2017). Mereka juga citra Allah: hakikat dan sejarah diakonia termasuk bagi yang berkeadaan dan berkebutuhan khusus (buruh, migran & pengungsi, penyandang disabilitas, LGBT). Cetakan ke-1. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bakker, A. dan A.C. Zubair, (2009), Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- Chen, P.R., & Marthin, (2003), Teologi Gustavo Gutierrez: Refleksi dari Praksis Kaum Miskin. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmaputera, E, (2000), "Kebangkitan Agama dan Keruntuhan Etika" dalam Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia: Theologia Religionum, Tim Balitbag PGI. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Darmawan, E. P., (2005), Agama Itu Bukan Candu: Tesis-tesis Feurbach, Marx, dan Tan Malaka. Yogyakarta: Resist Book.
- Dase, A.B., (2019), "Kontribusi Hermeneutis 1 Raja-Raja 21 terhadap Konflik Agraria di Indonesia." BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, 2 (1): 40-45.
- Hesselgrave, D. J., dan Rommen, E., (2009), Kontekstualisasi: Makna, Metode, dan Model. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Nanuru, R.F., (2017), Gereja di Jalan Keadilan: Fungsi Sosial Gereja Menghadapi Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Komunikasi di Bibir Pasifik. preprint (Open Science Framework).
- Pangrante, F., (2017), "Mantunu Tedong dalam Pusaran Ideologi Adat, Agama dan Kapitalisme, Retorik 5, no. Agama dan Praktik Hidup Sehari-hari." Universitas Sanata Dharma.
- Ritzer, G, dan Douglas J.G, (2004), Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian. Bantul: Kreasi Wacana.
- Stott, J, (1984), Isu-isu Global: Menentang Kepemimpinan Kristiani. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF,
- Suseno, F.M, (1999), Pemikiran Karl Marx. Jakarta: Gramedia.
- Schumann, Olaf, (2000), Milenium Ketiga & Tantangan Agama-Agama. Jakarta:Grasindo.
- Tjahjadi, L., dan Simon, (2007), Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan: Dari Descartes Sampai Whitehead. Yogyakarta: Kanisius.